

LAPORAN RINGKAS STUDI KELAYAKAN

**PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA
AKTIVITAS PENGELOLAAN KAPAL
(KBLI 52225)**

PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK

**No. 000012/2.0113-03/BS-FS/06/0340/1/V/2025
Tanggal: 16 Mei 2025**

atas Revisi

**No. 00008/2.0113-03/BS-FS/06/0340/1/IV/2025
Tanggal: 11 April 2025**



**KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
SYARIF, ENDANG & REKAN**

Registered Public Appraiser & Consultant

Asset - Business Valuation, Consulting & Advisory

LAPORAN RINGKAS STUDI KELAYAKAN

**PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA
AKTIVITAS PENGELOLAAN KAPAL
(KBLI 52225)**

PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK

No. 000012/2.0113-03/BS-FS/06/0340/1/V/2025

Tanggal: 16 Mei 2025

atas Revisi

No. 00008/2.0113-03/BS-FS/06/0340/1/IV/2025

Tanggal: 11 April 2025



No. 000012/2.0113-03/BS-FS/06/0340/1/V/2025

Bekasi, 16 Mei 2025

Kepada:

Direksi PT Humpuss Maritim Internasional Tbk
Mangkuluhur City Tower One, Lantai 27
JL. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3
Jakarta 12930 - Indonesia

**Perihal: Laporan Ringkas Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Aktivitas
Pengelolaan Kapal (KBLI 52225)**

Dengan hormat,

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 0013/SPK/MSE-03/ES/III/2025, tanggal 14 Maret 2025, **PT Humpuss Maritim Internasional Tbk** (atau selanjutnya disebut "**Perseroan**" atau "**HUMI**") yang bergerak di bidang usaha jasa kepelabuhanan dan maritim serta distribusi energi dan infrastruktur di Indonesia, telah menunjuk **KJPP Syarif, Endang, dan Rekan**, sebagai Penilai Independen untuk menyusun Laporan Studi Kelayakan Usaha Penambahan Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 52225 yaitu Aktivitas Pengelolaan Kapal.

Laporan ini merupakan revisi atas Laporan Penilaian sebelumnya yaitu Laporan No. 00008/2.0113-03/BS-FS/06/0340/1/IV/2025, tanggal 11 April 2025. Kami menyatakan bahwa membatalkan laporan sebelumnya, sehubungan dengan penelaahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-181/PM.023/2025, tanggal 30 April 2025. Hal-hal yang menjadi objek revisi adalah sebagai berikut.

- Menambahkan penjelasan adanya fakta material pada bagian kejadian setelah tanggal penilaian;
- Menambahkan bahasan terkait pangsa pasar spesifik kegiatan pengelolaan kapal.
- Menambahkan bahasan terkait potensi pasar mengenai kebutuhan dan ketersediaan jasa pengelolaan kapal;
- Revisi pembahasan keunggulan kompetitif yang spesifik membahas keunggulan yang berdampak terhadap jasa pengelolaa kapal;
- Menambahkan penjelasan terkait ketersediaan dan kebutuhan pekerja untuk menjalankan kegiatan usaha baru.

1. Nomor dan Tanggal Laporan Penilaian

Kami telah menyusun Laporan Studi Kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha (KBLI 52225) PT Humpuss Maritim Internasional Tbk dengan Laporan No. 000012/2.0113-03/BS-FS/06/0340/1/V/2025, tanggal 16 Mei 2025, atas revisi Laporan Penilaian

sebelumnya yaitu No. 00008/2.0113-03/BS-FS/06/0340/1/IV/2025, tanggal 11 April 2025.

2. Tanggal Penilaian

Tanggal Penilaian dalam Laporan Studi Kelayakan ini adalah per 31 Desember 2024.

3. Identitas Pemberi Tugas

Pemberi tugas dalam studi kelayakan ini adalah:

Nama Perusahaan : PT Humpuss Maritim Internasional Tbk
Bidang Usaha : Jasa Angkutan Laut dalam Negeri dan Angkutan Laut Perairan Pelabuhan dalam Negeri
Alamat : Mangkuluhur City Tower One, Lantai 27. Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3 Jakarta 12930 - Indonesia
Telepon/Fax. : +62-21 3950 6655/-
Website : <https://www.humi.co.id/>
Email : corpsec@humi.co.id

4. Latar Belakang

PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (atau selanjutnya disebut “Perseroan” atau “HUMI”) adalah sebuah Perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 21, tanggal 20 September 2016, oleh Martina, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0042923.AH.01.01.Tahun 2016, tanggal 28 September 2016.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan bergerak dalam bidang layanan aktivitas konsultasi manajemen, aktivitas *holding*, angkutan laut, aktivitas penempatan tenaga kerja, penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, pendidikan lainnya dan kegiatan penunjang pendidikan. Saat ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak dalam bidang usaha jasa kepelabuhanan dan maritim serta distribusi energi dan infrastruktur di Indonesia. Perseroan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan No. AL.001/714/SP_SIUPAL/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022. Perseroan telah menjalankan kegiatan operasional secara komersial sejak September 2016.

Perseroan berencana melakukan restrukturisasi grup dengan mengambil alih anak usaha dari entitas anak milik Perseroan bernama PT Energi Maritim Internasional (atau selanjutnya disebut “EMI”).

EMI semula didirikan dengan nama PT HT Kotug Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 191, tanggal 19 Desember 2013, oleh Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-01102.AH.01.01.Tahun 2014, tanggal 8 Januari 2014. Selanjutnya nama perusahaan diubah menjadi PT Energi Maritim Internasional berdasarkan Akta Notaris No. 56, tanggal 31 Maret 2020, oleh Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-0027516.AH.01.02.Tahun 2020, tanggal 3 April 2020.

Anggaran Dasar EMI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 12, tanggal 12 September 2023, oleh Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, mengenai perubahan susunan Direksi dan Komisaris. Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat No. AHU-AH.01.09-0164258, tanggal 18 September 2023.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan usaha EMI adalah bidang jasa pengangkutan laut (pelayaran) dalam dan luar negeri. Namun, sampai dengan tanggal studi kelayakan, yaitu 31 Desember 2024, EMI belum memulai operasi secara komersial.

Restrukturisasi grup dan pengambilalihan EMI menjadi entitas anak Perseroan bertujuan untuk memperkuat integrasi dan efisiensi fokus antara kegiatan usaha utama Perseroan yaitu jasa angkutan laut dengan kegiatan usaha penunjang Perseroan dalam mengelola kapal milik grup Perseroan. Oleh karena itu, diperlukan studi kelayakan untuk penambahan KBLI 52225 yaitu Aktivitas Pengelolaan Kapal yang ketentuannya sudah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2020”).

5. Maksud dan Tujuan Studi Kelayakan

Studi Kelayakan ini dibuat untuk mengetahui kelayakan usaha sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 52225 yaitu Aktivitas Pengelolaan Kapal serta sebagai syarat pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Penambahan Kegiatan Usaha (“POJK No.17/2020”), dan bukan untuk kepentingan perbankan ataupun kepentingan lainnya.

6. Data dan Informasi yang Digunakan

Dalam rangka melakukan Studi Kelayakan ini, kami telah mempelajari, menganalisis dan mempertimbangkan informasi sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 No. 01963/2.1032/AU.1/06/1814-1/1/VI/2023, tanggal 30 Juni

- 2023, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Daniel CPA, dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini wajar dalam semua hal yang material;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode 31 Desember 2023 No. 00468/2.1032/AU.1/06/11294-3/1/III/2024, tanggal 30 Maret 2024, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Said Amru, dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini wajar dalam semua hal yang material;
 3. Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2024, No. 00497/2.1032/AU.1/06/1294-4/1/III/2025, tanggal 28 Maret 2025 yang telah diaudit oleh Said Amru dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini wajar dalam semua hal yang material;
 4. Proyeksi Keuangan untuk tahun 2025 sampai dengan 2029;
 5. Legalitas Perseroan;
 6. Wawancara dan diskusi dengan manajemen Perseroan sehubungan dengan penugasan Studi Kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha, yakni dengan Bapak Taufik Agustono dari divisi *Business Development*;
 7. *Representation Letter* No. 073/DU-HUMI/IV/2025, tanggal 10 April 2025, sehubungan dengan Penugasan Penilaian Studi Kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha KBLI 52225 yaitu Aktivitas Pengelolaan Kapal.

7. Prosedur yang Digunakan

Dalam menyusun Studi Kelayakan ini, analisis dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2020, tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 17 /SEOJK.04/2020 Tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, serta Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII 2018 yang disusun oleh Masyarakat Penilai Indonesia (MAPPI) dengan memperhatikan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dan peraturan yang terkait yaitu mencakup:

1. Kajian Kelayakan Pasar;
2. Kajian Kelayakan Teknis;
3. Kajian Kelayakan Pola Bisnis;
4. Kajian Kelayakan Model Manajemen; dan
5. Kajian Kelayakan Keuangan.

8. Independensi Penilai

Dalam mempersiapkan Laporan Studi Kelayakan ini kami telah bertindak secara independen tanpa adanya konflik dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, dan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut. Kami juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini. Selanjutnya, Laporan Studi Kelayakan ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau kerugian pada pihak manapun. Imbalan yang kami terima adalah sama sekali tidak

dipengaruhi oleh kewajaran nilai yang dihasilkan dari proses analisis kelayakan ini dan kami hanya menerima imbalan sesuai dengan yang tercantum pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 0013/SPK/MSE-03/ES/III/2025, tanggal 14 Maret 2025.

9. Ruang Lingkup Penugasan

Ruang Lingkup penugasan adalah sesuai dengan tujuan dari Studi Kelayakan ini, yaitu untuk melakukan kajian atau analisis kelayakan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 52225 yaitu Aktivitas Pengelolaan Kapal.

Berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2020, ruang lingkup dari Penugasan Penilaian Profesional, paling sedikit meliputi:

1. Tujuan dari Penugasan Penilaian Profesional;
2. Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam Penugasan Penilaian Profesional; dan
3. Dasar Nilai dan Premis Nilai yang digunakan.

10. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan studi kelayakan ini adalah:

- a. Laporan studi kelayakan ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam studi kelayakan.
- c. Dalam menyusun laporan studi kelayakan ini, penilai mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemberi tugas atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
- d. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh manajemen dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- f. Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- g. Penilai bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan yang dihasilkan.
- h. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek studi kelayakan dari pemberi tugas.

11. Kualifikasi Penilai

Kami adalah Kantor Jasa Penilai Publik yang secara resmi telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1498/KM.1/2012, tanggal 28 Desember 2012,

dengan nama Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang dan Rekan dengan Izin KJPP No. 2.12.0113.

Penilai Usaha yang menandatangani laporan penilaian usaha ini merupakan Penilai Usaha bersertifikat MAPPI dengan perizinan sebagai berikut:

MAPPI	: No. 09-S-02341
Izin Penilai Publik	: No. B-1.12.00340
Klasifikasi izin	: Penilaian Bisnis
Register	: No. RMK-2017.00303
STTD OJK	: No. STTD.PB-08/PJ-1/PM.02/2023
STTD IKNB	: No. 173/NB.122/STTD-P/2019

12. Kejadian Setelah Tanggal Penilaian

Pada tanggal 7 Mei 2025, Perseroan telah mengumumkan Laporan Informasi atau Fakta Material No. 117/DU-HUMI/V/2025 kepada publik, mengenai pendirian/pengambilalihan anak usaha baru yaitu PT Energi Maritim Internasional (EMI) dengan tujuan untuk menunjang rencana strategi jangka panjang Perseroan.

Menurut informasi yang Penilai terima dari manajemen, biaya yang diperlukan Perseroan untuk melakukan perbaikan tersebut mencapai Rp875.000.000,-. Biaya tersebut terdiri dari biaya hukum dan legalitas sebesar Rp100.000.000,-, biaya konsultan bisnis dan manajemen sebesar Rp100.000.000,-, biaya SDM dan pelatihan sebesar Rp100.000.000,-, biaya *re-branding* sebesar Rp75.000.000,-, serta biaya operasional sebesar Rp500.000.000,-.

Namun demikian, pengambilalihan EMI tidak memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan.

13. Kelayakan Pasar

Dari Kajian Kelayakan Pasar, industri transportasi kapal laut di Indonesia menunjukkan prospek kesinambungan yang kuat, ditandai dengan peningkatan aktivitas pelabuhan secara umum pada tahun 2023. Meskipun volume bongkar barang dalam negeri mengalami sedikit penurunan sebesar 0,47%, volume muat barang meningkat 3,27%, mencerminkan peran penting sektor ini dalam distribusi logistik nasional. Untuk pelayaran luar negeri, pertumbuhan lebih signifikan terlihat dengan peningkatan bongkar dan muat masing-masing sebesar 17,94% dan 10,00%. Kunjungan kapal juga meningkat 10,07% secara nasional, menandakan tingginya mobilitas angkutan laut. Keberadaan 25 pelabuhan strategis yang menopang mayoritas aktivitas pelayaran, khususnya pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Belawan, semakin memperkuat struktur jaringan transportasi laut Indonesia. Tren peningkatan volume muat barang di sejumlah pelabuhan strategis dan pertumbuhan

pelayaran luar negeri menjadi indikator positif bahwa pengelolaan kapal sebagai unit bisnis memiliki potensi berkelanjutan dan strategis dalam mendukung konektivitas serta pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan jasa pengangkutan laut terus tumbuh, sehingga membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk mengembangkan layanan pengelolaan kapal dalam merespon lonjakan kebutuhan terhadap layanan pengelolaan kapal secara menyeluruh, mulai dari manajemen operasional, pemeliharaan, penyediaan awak kapal, hingga pengelolaan rute dan efisiensi bahan bakar. Pasar ini tidak hanya mencakup kapal niaga dan kargo, tetapi juga kapal tanker, kapal curah, hingga kapal pendukung industri energi. Dalam konteks ini, Perseroan memiliki posisi yang strategis untuk menangkap peluang tersebut. Pangsa pasar dalam kegiatan usaha pengelolaan kapal yang akan dijalankan melalui EMI berasal dari pengelolaan armada kapal milik Grup Perseroan yang tercatat sampai dengan akhir tahun 2024 mencapai sebanyak 47 unit kapal, setelah adanya penambahan 11 unit kapal baru di tahun tersebut. Menurut publikasi yang ada, pada tahun 2025 Perseroan mengalokasikan belanja modal (capex) sebesar US\$39,57 juta untuk pengadaan 10 kapal tambahan yang terdiri dari 4 kapal Oil & Chemical Tanker, 5 Tugboat, dan 1 Platform Supply Vessel (PSV). Selain mengelola operasional dan perawatan kapal, EMI juga akan menjalankan kegiatan jasa rekrutmen dan manajemen kru kapal yang saat ini (2024) mencapai 1.849 orang awak kapal. Layanan ini akan memperkuat posisi Perseroan dalam rantai industri maritim dengan menawarkan solusi menyeluruh yang mencakup pengelolaan teknis kapal hingga pengelolaan sumber daya manusia. Dengan pangsa pasar yang signifikan dari Grup Perseroan, penambahan kegiatan usaha ini memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan reputasi dan efisiensi operasional yang dapat mendukung ekspansi ke pasar eksternal di masa mendatang.

Potensi pasar dari aktivitas pengelolaan kapal di Indonesia sangat besar, seiring dengan pertumbuhan sektor logistik dan industri maritim yang semakin vital dalam mendukung perdagangan domestik maupun internasional. Kesenjangan dalam ketersediaan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan kapal semakin nyata dengan jumlah armada kapal yang terus bertambah, sementara kebutuhan akan pengelolaan kapal dipastikan akan terus meningkat. Oleh karena itu, keberadaan jasa pengelolaan kapal ini akan selalu relevan dan dibutuhkan. Dengan pengalaman dan infrastruktur yang dimiliki Perseroan di bidang pengangkutan energi dan logistik laut, dapat memperluas lini bisnisnya melalui layanan *ship management* yang profesional dan terintegrasi. Selain itu, dengan kemampuan Perseroan dalam mengelola kapal tanker dan koneksi dengan industri energi, Perseroan berpotensi menjadi pemain utama dalam pasar pengelolaan kapal, khususnya untuk segmen kapal yang melayani kebutuhan industri energi, bahan kimia, dan logistik industri berat lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak hanya memperkuat posisinya di sektor pengelolaan kapal, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di industri maritim Indonesia.

Sasaran Perseroan dalam rencana penambahan kegiatan usaha ini melalui anak usahanya yaitu EMI adalah mengelola kapal-kapal yang dimiliki oleh grup. Pada tahun-tahun operasional berikutnya, setelah memiliki pengalaman dan portofolio dalam mengelola kapal, melalui anak usahanya, Perseroan akan menawarkan jasa pengelolaan kapal kepada pihak ketiga. Strategi pemasaran yang dapat dilakukan dalam pengelolaan kapal milik grup Perseroan meliputi pendekatan *business to business* dengan menawarkan layanan manajemen kapal terintegrasi dengan anak usaha dan afiliasi dalam grup, sehingga menciptakan efisiensi operasional dan standarisasi kualitas.

Dalam hal pesaing dan persaingan, penting untuk terus memantau perkembangan dan strategi perusahaan dalam industri dan sektor serupa di pasar modal dan industri. Saat ini, beberapa pesaing yang memiliki bidang usaha yang sama dengan Perseroan dalam industri pengelolaan kapal adalah sebagai berikut.

1. PT Wintermar Offshore Marine Tbk;
2. PT Buana Lintas Lautan Tbk;
3. PT Sillo Maritime Perdana Tbk;
4. PT Jasa Armada Indonesia Tbk;
5. PT Samudera Indonesia Ship Management; dan
6. PT Synergy Marine Indonesia.

Dengan analisis pasar tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan pasar adalah layak.

14. Kelayakan Teknis

Dari Kajian Kelayakan Teknis, dalam rencana penambahan kegiatan usaha ini, Perseroan akan menjalankan lini usaha aktivitas pengelolaan kapal dengan standar pemeliharaan internasional, melalui anak usahanya yaitu EMI. Berdasarkan wawancara Penilai dengan Manajemen Perseroan, rencana kapasitas dan kemampuan operasional EMI dalam mengelola kapal adalah paling banyak delapan (8) kapal per tahunnya pada tahap awal proyeksi, kemudian akan ditingkatkan sesuai dengan permintaan pasar. Secara teknis, setelah Perseroan melalui EMI ditunjuk oleh *ship owner company*, kegiatan operasional dalam aktivitas pengelolaan kapal dapat terdiri dari: 1) penjadwalan perawatan kapal dan mesin; 2) manajemen *spare part* kapal; 3) pengadaan logistik operasional; 4) penunjukan agen kapal (*ship agency*); serta 5) rekrutmen dan manajemen kru kapal. Perseroan telah memiliki tenaga ahli profesional dalam bidang perkapalan yang berkaitan dengan rencana penambahan kegiatan usaha ini. Menurut informasi dari manajemen, tenaga ahli profesional yang dimiliki Perseroan terdiri dari 1 orang *chief engineer onboard ship* serta 1 orang *marine QS-SHE expert*. Selain itu, Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan keterampilan para karyawan dengan berbagai program pelatihan yang disusun berdasarkan posisi dan tugas yang dilakukan. Hal ini untuk memastikan karyawan dilengkapi dengan kemampuan yang

baik dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari serta memaksimalkan potensi, kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dari masing-masing karyawan.

Dengan analisis teknis tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan teknis adalah layak.

15. Kelayakan Pola Bisnis

Dari Kajian Kelayakan Pola Bisnis, pengalaman Perseroan sebagai perusahaan yang menyediakan jasa pelayaran dan maritim serta distribusi energi dan infrastruktur di Indonesia Perseroan dinilai memiliki keunggulan dalam menjalankan manajemen dan sistem operasional yang kompeten untuk melakukan ekspansi usaha. Keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan diuraikan sebagai berikut: Dengan pengalaman puluhan tahun, Perseroan telah menjalin kerja sama strategis jangka panjang dengan berbagai perusahaan energi besar nasional dan internasional, termasuk Pertamina, BP, dan perusahaan migas lainnya. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk terus berekspansi dan menambah armada kapal. Selain itu, Perseroan juga memiliki struktur keuangan yang sehat dan efisiensi biaya operasional yang baik, sehingga Perseroan memiliki kapasitas untuk membiayai ekspansi usaha secara organik maupun melalui kerja sama strategis. Armada kapal yang dimiliki Perseroan dan Grup Perseroan akan menciptakan peluang monopoli pangsa pasar bagi EMI dalam menjalankan kegiatan usaha pengelolaan kapal secara profesional dalam Grup, yang berujung pada efisiensi operasional dan kualitas layanan yang dapat dikendalikan seluruhnya oleh Perseroan.

Kemampuan pesaing untuk meniru produk memang tidak dapat dihindari, sehingga membuat kegiatan usaha dalam bidang ini menjadi sangat kompetitif. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan oleh Perseroan diantaranya adalah 1) Meningkatkan kualitas dan diversifikasi layanan; 2) Melindungi dan mendaftarkan hak kekayaan intelektual; 3) Melakukan inovasi layanan secara berkelanjutan; 4) Memperkuat loyalitas klien terhadap layanan Perseroan; dan 5) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam manajemen dan operasional Perseroan.

Dengan analisis pola bisnis tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan pola bisnis adalah layak.

16. Kelayakan Model Manajemen

Dari kelayakan model manajemen, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki 48 orang karyawan, sedangkan EMI belum memiliki karyawan karena belum menjalankan kegiatan operasi komersialnya, namun diperkirakan membutuhkan sebanyak 28 orang karyawan yang akan dialokasikan melalui mutasi karyawan Perseroan maupun rekrutmen karyawan baru untuk mengisi posisi pada divisi teknis *marine*, *safety/QHSE*, *finance* (yang terdiri dari *procurement*, keuangan, dan *accounting*), legal, dan *human capital* (yang termasuk karyawan darat dan

karyawan laut) yang kualifikasinya masing-masing akan disesuaikan dengan posisi dan divisi yang akan diisi.

Sampai dengan laporan ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang didaftarkan terkait dengan penambahan kegiatan usaha baru.

Risiko utama yang mungkin dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut.

1. Risiko persaingan usaha;
2. Risiko operasional;
3. Risiko ketergantungan pada klien dari grup;
4. Risiko perubahan regulasi dan kepatuhan;
5. Risiko keselamatan dan tanggung jawab hukum; dan
6. Risiko keuangan dan fluktuasi ekonomi.

Perseroan telah memiliki pengalaman dan keberhasilan yang baik dalam industri pelayaran dan maritim Indonesia untuk mengelola usaha dalam skala ekonomi yang besar, sehingga Perseroan juga memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik untuk menambah aktivitas lini bisnisnya. Dengan rekam jejak panjang di industri maritim, telah terbukti mampu mengelola berbagai jenis armada dan layanan yang kompleks secara profesional. Skala usaha yang besar juga memberikan keunggulan dalam efisiensi biaya, daya tawar terhadap pemasok, serta optimalisasi sumber daya manusia dan logistik.

Selanjutnya, restrukturisasi grup yang dilakukan melalui pengambilalihan anak usaha, yang akan menjalankan aktivitas pengelolaan kapal yaitu EMI, semakin memperkuat efisiensi operasional dan integrasi layanan dalam satu lini bisnis yang lebih terfokus. Langkah strategis ini memungkinkan Perseroan memberikan layanan pengelolaan kapal secara menyeluruh mulai dari operasional teknis, perawatan mesin, penyediaan logistik, hingga manajemen kru secara lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi di pasar.

Dengan analisis model manajemen tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan model manajemen adalah layak.

17. Kelayakan Keuangan

Dari Kajian Kelayakan Keuangan, Perseroan tidak memerlukan biaya pendirian maupun biaya investasi (*capex*), sehingga Perseroan akan melakukan pendanaan yang bersumber dari kas yang tersedia. Perseroan diproyeksikan mencatatkan tambahan laba bersih dari penambahan kegiatan usaha baru sebesar Rp1,83 miliar pada tahun 2025, Rp1,67 miliar pada tahun 2026, Rp1,47 miliar pada tahun 2027, Rp1,27 miliar pada tahun 2028, dan sebesar Rp1,05 miliar pada tahun 2029.

Analisis kelayakan proyek menunjukkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha ini memenuhi kriteria kelayakan dengan variabel-variabel sebagai berikut:

- **Net Present Value (NPV) > 0 → Layak**
NPV yang dihasilkan adalah sebesar Rp14.941.220.000,-. Dengan demikian, hasil NPV yang positif atau lebih dari nol menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena memberikan keuntungan.
- **Profitability Index (PI) > 1 → Layak**
PI yang diperoleh adalah sebesar 7,66923. Dengan demikian, hasil PI yang lebih dari 1 menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena memberikan keuntungan dari kegiatan usaha yang dilakukan.

Kemudian, dari analisis sensitivitas, menurunnya volume pendapatan merupakan faktor yang paling sensitif terhadap kelayakan usaha.

Dengan analisis keuangan tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan keuangan adalah layak.

18. Kesimpulan

Dengan demikian, berdasarkan analisis atas Kelayakan Pasar, Kelayakan Teknis, Kelayakan Pola Bisnis, Kelayakan Model Manajemen, dan Kelayakan Keuangan, dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 52225 yaitu Aktivitas Pengelolaan Kapal adalah layak.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Studi Kelayakan Usaha. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan Usaha ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan Usaha ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kesimpulan mengenai layak atau tidaknya Studi ini mungkin berbeda.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas kepercayaan yang telah diberikan kami ucapkan terima kasih dan kami berharap kiranya laporan ini dapat berguna bagi kemajuan usaha selanjutnya.

 Hormat kami,
KJPP SYARIF, ENDANG & REKAN



Endang Sunardi, S.T., M.M., MAPPI (Cert.)

Rekan

<i>MAPPI</i>	: No. 09-S-02341
<i>Izin Penilai Publik</i>	: No. B-1.12.00340
<i>Klasifikasi Izin</i>	: Penilaian Bisnis
<i>Register</i>	: No. RMK-2017.00303
<i>STTD OJK</i>	: No. STTD.PB-08/PJ-1/PM.02/2023
<i>STTD IKNB</i>	: No. 173/NB.122/STTD-P/2019